



Relawan Ganjar-Mahfud Tolak Hasil Pilpres

MINTA PENCOBLOSAN DIULANG

Jakarta, MIMBAR - Sejumlah organisasi relawan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menolak hasil Pilpres 2024 dan meminta agar pelaksanaannya diulang karena dianggap penuh kecurangan.



"Meminta kepada KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jujur, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti Komisioner KPU dan Bawaslu yang ada saat ini," kata perwakilan relawan, Haposan Situmorang dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Sabtu (18/2).
Haposan membeberkan kecurangan itu terjadi sejak Mahkamah Konstitusi (MK)

mengubah syarat usia pencalonan presiden yang membuat Gibran Rakabuming Raka dapat berlaga di Pilpres 2024.
Ia juga menyinggung sikap KPU yang menerima pendaftaran Gibran meski belum ada revisi aturan setelah MK mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.
"Hal ini terbukti keputusan DKPP dalam

■ Bersambung ke Hal 11

Surya Paloh Dipanggil Jokowi ke Istana

Jakarta, MIMBAR - Presiden Jokowi dikabarkan memanggil Ketua Umum NasDem Surya Paloh menghadap ke Istana sore ini, Minggu (18/2), pukul 18.00 WIB.
Elite NasDem Ahmad Sahroni mengonfirmasi rencana pertemuan Jokowi dan Surya Paloh di Istana

sore ini.
"Dipanggil Pak presiden beliau," ujar Sahroni.
Sahroni belum mengetahui agenda yang akan dibahas oleh Jokowi dengan Surya Paloh.
"Agendanya apa belum tahu saya," ujarnya.

■ Bersambung ke Hal 11



Presiden Jokowi dikabarkan memanggil Surya Paloh menghadap ke Istana sore ini, Minggu (18/2/2024), di Istana Kepresidenan, Jakarta. (Sumber: Twitter @jokowi)

PKS Minta KPU Evaluasi Sirekap

Jakarta, MIMBAR - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku menerima banyak masukan dari masyarakat yang menilai data hasil penghitungan suara di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akurat.

■ Bersambung ke Hal 11

UPDATE JUMLAH PETUGAS PEMILU MENINGGAL

BERTAMBAH JADI 57 ORANG



Jakarta, MIMBAR - Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) mengungkapkan data terbaru jumlah petugas Pemilu 2024 yang meninggal dunia selama bertugas. Tercatat hingga Sabtu (17/2/2024) pukul 18.00 WIB, jumlah petugas yang meninggal mencapai 57 orang.

Dari data yang dilaporkan Kemenkes 29 kasus di antaranya merupakan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selanjutnya disusul dengan 10 kasus dari Linmas,

■ Bersambung ke Hal 11



Sinyal Tom Lembong kepada Pendukung

Putaran Kedua Terbuka Lebar

Medan, MIMBAR - Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) meminta pendukung tetap tenang, meski hasil quick count menunjukkan keunggulan untuk Prabowo-Gibran.

Menurut Co-Kapten Timnas Amin, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, peluang Amin melenggang di putaran kedua Pilpres 2024 masih terbuka lebar.

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

9 SYA'BAN 1445 H

Subuh : 05:23 WIB	Maghrib : 18:42 WIB
Zuhur : 12:43 WIB	Isya : 19:52 WIB
Ashar : 16:01 WIB	■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah

Diambang Perpecahan

Oleh Dr A Rasyid, MA



SEYOGYANYA kita sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa guna menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Hal-hal yang dapat memicu munculnya kegaduhan dan perpecahan bangsa harus dapat diawasi dan dihindari, termasuk pada munculnya kecurangan Pilpres.

■ Bersambung ke Hal 11

PMDI Medan Tekankan Pentingnya Penguatan Tauhid

Medan, MIMBAR - Penguatan tauhid umat menjadi hal yang sangat penting dan mendesak dalam upaya membangun masyarakat madani yang berperadaban.

Ketua Perhimpunan Masyarakat Dakwah Indonesia Kota Medan, Al Ustad Dr. H. Sori Monang An-Nadwi Ranagkuti, M.Th menyampaikan itu dalam keterangan persnya yang diterima Mimbar Umum, akhir pekan lalu.
Ustad Sori Monang mengemukakan itu usai pelantikan Kepengurusan Perhimpunan Masyarakat Dakwah Indonesia (PMDI) Kota Medan masa amaliyah (periode) 2024-2027 oleh Ketua Umum PMDI Sumut

■ Bersambung ke Hal 11



Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA (kiri) melantik pengurus PMDI Medan yang diketuai Dr. H. Sori Monang Rkt An-Nadwi, M.Th (dua kanan). (Foto ist)



- Pura-pura gak denger ...
- Hehehe ...

Israel Serang RS Nasser di Gaza, Kini Sudah Tak Berfungsi

Gaza, MIMBAR - Rumah Sakit Nasser di Jalur Gaza, Palestina saat ini dilaporkan telah sepenuhnya tidak berfungsi lagi usai diserang tentara Israel beberapa hari lalu.

"Hanya ada empat staf medis yang saat ini merawat pasien di dalam Rumah Sakit Nasser di kota selatan Khan Younis," kata juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf al-Qidra, kepada Reuters, Ahad (18/2).

Ia mengatakan, kompleks medis Nasser, yang merupakan rumah sakit terbesar di Gaza, Palestina, adalah tulang punggung layanan kesehatan di Jalur Gaza selatan.

"Penghentian fungsinya merupakan hukuman mati bagi ratusan ribu pengungsi Palestina di Khan Younis dan Rafah," katanya.

Qidra mengatakan, kurangnya bahan bakar dan pertempuran di sekitar rumah sakit telah membuat fasilitas tersebut tidak dapat digunakan.

Pasukan Israel menggerebek rumah sakit tersebut pada Kamis (15/2) lalu. Mereka menangkap sejumlah orang di RS Nasser dan

menahan banyak staf medis di sana.

Dilaporkan Reuters, militer Israel mengatakan mereka sedang memburu para militan di Nasser dan sejauh ini telah menangkap 100 orang di tempat tersebut, membunuh orang-orang bersenjata di dekat rumah sakit dan menemukan senjata di dalamnya.

Hamas membantah tuduhan bahwa para pejuangnya menggunakan fasilitas medis untuk berlindung. Setidaknya dua sandera Israel yang dibebaskan mengatakan bahwa mereka ditahan di Nasser.

Sekitar 10.000 orang mencari perlindungan di rumah sakit tersebut pada awal pekan ini, namun banyak yang meninggalkan RS Nasser untuk mengantisipasi serangan Israel atau karena perintah untuk mengungsi dari rumah sakit tersebut, kata Kementerian Kesehatan Gaza.

Lebih jauh ke selatan di Rafah, di mana lebih dari separuh dari 2,3 juta penduduk Gaza berlindung, musim dingin yang ekstrem menambah buruknya kondisi yang sudah ada, ketika angin menerbangkan beberapa tenda pengungsi dan hujan membanjiri tenda-tenda lainnya.

Rencana Israel menyerbu Rafah memicu kekhawatiran internasional tindakan tersebut akan memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza.

Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh menyalahkan Israel atas kurangnya kemajuan dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza,

kelompok itu mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu.

Haniyeh menambahkan Hamas tidak akan menerima apa pun selain gencatan senjata permanen, penarikan pasukan Israel dari Gaza, dan "pencabutan pengepungan yang tidak adil", serta pembebasan tahanan Palestina yang menjalani hukuman di penjara Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah "kemenangan mutlak" atas Hamas, namun pada hari Rabu ia menambahkan bahwa fleksibilitas dalam posisi kelompok tersebut dapat memajukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang akan membuat para sandera dibebaskan.

Serangan udara dan darat Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza dan memaksa hampir semua penduduknya meninggalkan rumah mereka. Otoritas kesehatan Palestina mengatakan 28.858 orang, sebagian besar warga sipil, telah tewas.

Sedikitnya 83 orang tewas dalam serangan udara di Jalur Gaza sejak Jumat, kata pejabat kesehatan, termasuk satu orang pada hari Sabtu di Rafah, sebuah wilayah yang berbatasan dengan Mesir dan yang menurut Israel adalah benteng terakhir Hamas.

Militer Israel mengatakan jet-jet tempurnya telah menewaskan sejumlah militan dalam pertempuran di Gaza sejak Jumat. (cnni/js)

Putaran Kedua...

Dari Halaman 1

"Kemungkinan terjadinya putaran kedua masih terbuka lebar, setelah tabulasi volume pelanggaran, penyimpanan, melampaui margin kemenangan yang diklaim kubu tertentu," kata Tom Lembong, lewat video yang diunggahnya lewat akun Instagram, Ahad (18/2).

Mantan Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menga-

jak para pendukung Amin tetap optimistis dan terus mengawal jalannya penghitungan suara.

Dia juga mengajak masyarakat mendokumentasikan temuan pelanggaran, serta melaporkan ke tim hukum Timnas Amin. Hal ini dilakukan demi perbaikan Pemilu dan penguatan demokrasi.

"Setiap suara itu penting, setiap suara itu harus dikawal dan harus dijemput," pungkask Tom. (rm/js)

PKS Minta...

Dari Halaman 1

Ketua Fraksi PKS di DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, data yang ditampilkan di situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) <https://pemilu2024.kpu.go.id/> itu tidak sesuai dengan prosentase suara partai yang masuk.

"Pun jika dijumlahkan perolehan suara partai dan masing-masing calegnya totalnya tidak sinkron dengan yang tertulis di laman tersebut," tutur Jazuli dalam keterangan resminya, Ahad (18/2).

Jazuli khawatir persoalan data suara parpol itu akan menjadi masalah baru terkait integritas hasil pemilu. Ia menekankan, setiap suara

yang diperoleh partai politik sangat berharga, sehingga KPU harus menjamin akurasi dan validitas sistem hitung mereka.

Menurut Jazuli KPU harus mengevaluasi real count penghitungan suara yang diunggah di situs mereka sendiri. "Menjelaskan kepada publik mengapa angka-angkanya demikian dan menimbulkan banyak tanya di masyarakat," ujar Jazuli.

Jazuli bahkan meminta KPU menutup Sirekap jika lembaga penyelenggara pemilu itu tidak bisa memperbaiki akurasi dan validitas data yang ditampilkan. Tujuannya, agar tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat kepada hasil pemilu. (kps/js)

Bertambah Jadi...

Dari Halaman 1

sembilan kasus dari saksi, enam kasus dari petugas, dua kasus dari panitia pemungutan suara, dan satu kasus dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kemenkes menurukan pihaknya sudah menyiapkan mitigasi skrining dan pembatasan usia untuk petugas Pemilu. Namun, di beberapa daerah yang masih kurang SDM, orang dengan usia lanjut masih harus dilibatkan dalam proses pemungutan suara.

Dari laporan yang ada, berikut ini adalah data usia petugas pemilu yang meninggal dunia selama Pemilu 2024:

Usia 17-20 tahun: 4 kasus
Usia 21-30 tahun: 7 kasus
Usia 31-40 tahun: 8 kasus

Usia 41-50 tahun: 18 kasus
Usia 51-60 tahun: 15 kasus
Usia lebih dari 60 tahun: 5 kasus

Sementara untuk sebaran wilayah, Jawa Barat menjadi yang tertinggi dengan 13 kasus. Berikut ini adalah data lengkapnya dari Kemenkes RI:

Jawa Barat: 13 kasus
Jawa Tengah: 11 kasus
Jawa Timur: 12 kasus
DKI Jakarta: 6 kasus
Sumatera Utara: 2 kasus
Sumatera Selatan: 2 kasus
Banten: 2 kasus
Kalimantan Barat: 2 kasus
Sulawesi Selatan: 2 kasus
Riau: 1 kasus
Sumatera Barat: 1 kasus
Daerah Istimewa Yogyakarta: 1 kasus
Kalimantan Timur: 1 kasus
Sulawesi Utara: 1 kasus
(det/js)



Surya Paloh...

Dari Halaman 1

Dia hanya mengatakan pertemuan Jokowi dan Surya Paloh di Istana akan digelar sore ini. "Pukul 18.00 WIB," ujarnya.

TIDAK ADA KOORDINASI

Terpisah, Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan, Ketua Umum Partai Nasdem tidak mengkoordinasikan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, Ahad

(18/2) kemarin ke partai koalisi pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Tidak ada koordinasi dengan ketum-ketum partai di Koalisi AMIN. Tidak ada," ujar Cucun saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Ahad.

Meski demikian, PKB menghormati pertemuan Surya dengan Jokowi itu. Menurut dia, setiap partai politik memiliki hak masing-masing untuk membangun komunikasi politik.

Oleh sebab itu, sesama partai politik tidak boleh mengintervensi. "Itulah hak Bang Surya

Paloh kalau memang demikian, dan kami tidak boleh mengintervensi hak-hak semua partai," ujar Cucun.

Cucun yang juga merupakan Ketua Fraksi DPR RI itu enggan mengira-ngira apa topik pembicaraan antara Surya dengan Presiden Jokowi itu.

"Kami tidak dapat mengira-ngira," lanjut dia sembari mengingatkan lagi bahwa yang dilakukan Surya adalah haknya sebagai ketua umum partai politik. (bes/js)

Relawan Ganjar-Mahfud...

Dari Halaman 1

keputusannya komisioner KPU dinyatakan berda-lah, ini sifatnya final and binding," kata Haposan.

Selain pencalonan Gibran, para relawan juga menilai Presiden Joko Widodo cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024 dengan mengerahkan aparat dan bantuan sosial untuk memenangkan kandidat tertentu. Haposan juga menyinggung dugaan penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik demi mendukung salah satu pasangan.

"Dugaan kuat kecurangan dalam pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis yang mendatangkan keuntungan bagi paslon tertentu secara sungguh-sungguh telah mengkhianati demokrasi dan konstitusi," kata dia.

Seperti diketahui, hasil hitung cepat sejumlah lembaga menunjukkan bahwa pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dan berpotensi menang satu putaran.

Berdasarkan hitung cepat Litbang Kompas per Sabtu (17/2/2024) siang dengan data masuk 99,80 persen, Prabowo-Gibran memperoleh 58,48 persen suara. Sementara itu, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mendulang 25,21 persen suara. Lalu, pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD

mendapatkan 16,31 persen suara.

MINTA DPR PANGGIL KPU

Sebelumnya, Deputi Kanal Media Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra mengusulkan agar DPR memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meminta penjelasan tentang dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurutnya, hal ini harus dilakukan DPR lewat komisi terkait mengingat parlemen memiliki fungsi pengawasan.

"Saya kira kita juga memiliki DPR. Nah saya kira, DPR khususnya komisi yang berkepentingan atau yang bertanggung jawab terhadap area ini, saya kira juga sudah seyogyanya kami menghimbau untuk segera menjalankan fungsi pengawasannya untuk memanggil KPU," kata Karaniya dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta, Jumat (16/2).

Karaniya menuturkan, DPR bisa memanggil KPU sebagai penyelenggara Pemilu untuk mengurai persoalan, bukti dan kegagalan selama proses pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Kata dia, semua persoalan itu bahkan sudah beredar di media sosial maupun media massa dalam tiga hari ini. Di lain sisi, pengawasan itu juga dianggap penting untuk mewujudkan transparansi kepada publik tentang proses Pemilu 2024.

"Nah itu sekali lagi kalau dari saya, kami mendesak agar transparansi publik terhadap data

tabulasi suara, sampai ke level C1 itu harus dijamin validitasnya oleh KPU," ujar Karaniya.

Menurut dia, masyarakat dari berbagai elemen seperti pegiat demokrasi dan kepemiluan, akademisi hingga warganet juga berperan mengawasi proses transparansi tersebut. Ia pun berharap, dengan adanya pengawasan, maka jalannya Pemilu 2024 yang jujur dan adil dilihat dari keabsahan suara, dapat terwujud.

"Itu yang saya kira satu hal yang sangat penting yang saya kira harus dijamin oleh KPU dan segera diperbaiki, segera diaudit, sehingga kita yakin Pemilu 2024 ini berlangsung dengan legitimate berdasarkan data-data yang valid dan sah," pungkasknya.

Sebagai informasi, dua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Gibran Rakabuming Raka, menemukan indikasi kecurangan di dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Pada saat yang sama, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI juga mendapati adanya sejumlah pelanggaran pemilu, baik di dalam pemungutan maupun penghitungan suara. Demikian pula KPU yang menemukan adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaan pemilu kemarin.

Atas berbagai indikasi yang ditemukan, Presiden Joko Widodo meminta agar pihak yang berkeberatan atas temuan-temuan itu membawa persoalan ini ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga bisa ditindaklanjuti. (kps/js)

PMDI Medan...

Dari Halaman 1

Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, Senin, lalu di Wong Solo Jalan Gajah Mada.

Pelantikan ditandai menyanyikan mars PMDI Medan yang dirilis Prof. Dr. Syahrin Harahap, dibawakan Grup hasil binaan, ibu Desy Astuti Purba, A.M.KeB, Wakil Bendahara.

Pengurus yang dilantik terdiri atas Ketua Umum Dr. H. Sori Monang Rangkuti, M Th, Wakil Ketua Kapten Inf. Abdul Manan Marpaung, H. Muslim, MM, Dr. Abdul Rasyid, MA, Dr. H. Dhiauddin Tanjung, MA, dan Abdul Khaidir Dalimunthe, S.Pd.I

Sekretaris Umum, Dr. Hendripal Panjaitan, S.Pd, MA dan Wakil Khairuddin Soleh Harahap, MH, Kamaluddin Siregar, MA, Asrul

Nasution, S.Pd, M.Pd, Anwar Saleh Nasution, S.Sos.

Bendahara Umum, Marhayani Polem Simanjuntak, S.Ag, M.Pd.I, Wakil, Desy Astuti Purba, A.M.KeB, Julianti asihati Hasibuan, M.Pd, Rasimah Purba, S.Ag.

Sori Monang yang juga menjabat Dekretaris 1 Komisi Fatwa MUI Sumut itu mengatakan, PMDI Medan segera melakukan pemetaan dakwah sehingga para da'i mampu menguasai daerah dakwah dengan baik dan tepat sasaran.

Selama ini, katanya banyak dakwah tidak tepat sasaran sehingga dakwah tidak membuahkan hasil yang baik. Padahal tujuan utama dakwah adalah untuk mengubah masyarakat dari yang tidak baik menjadi lebih baik sesuai tututan agama Islam.

PMDI Kota Medan juga melakukan pengkaderan da'i sehingga muncul para da'i muda yang handal untuk diterjunkan di tengah-tengah masyarakat yang sesuai dengan zamannya, kata Sori Monang, Ketua Lembaga Dakwah PWNU Sumut dua priode diteruskan dengan ketua Lembaga Wakaf.

PMDI juga menyiapkan pusat kajian yang berkaitan dengan persoalan keislaman, sehingga masyarakat yang terbentur dengan persoalan agama dapat melakukan konsultasi, kata Sori Monang, Dosen FUSI UINSU.

Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA berharap para da'i yang terjun ke tengah-tengah masyarakat dapat memberi kesejukan dan wawasan keislaman yang mampu membangun dunia yang ber peradaban. (R/A-02)

Hidayah



Diambang Perpecahan

Dari Halaman 1

Boleh jadi kecurangan pada Pilpres 2024 ini dapat memicu muncul perpecahan bangsa, jika masing-masing pihak tidak dapat menerima hasil diperoleh. Mereka yang dicurangi merasa dirugikan sehingga memupuskan harapan besar mereka kepada negeri ini.

Pengawalan masyarakat pada Pemilu kali ini terlihat jauh berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Fakta itu ditandai cukup banyak media sosial yang menyoroti peristiwa-peristiwa kecurangan yang terjadi di berbagai Tempat Pemungutan Suara di tanah air, termasuk komentar-komentar tajam atas dugaan kecurangan itu membentuk opini masyarakat.

Ada beberapa hal yang dapat kita pahami dari kesungghaan masyarakat menyoroti keberlangsungan Pemilu. Pertama boleh jadi karena kekhawatiran atas peristiwa kecurangan itu sendiri, karena pengalaman masa lalu juga terjadi kecurangan. Jika kecurangan dapat leluasa terjadi, maka untuk apa dilaksanakan Pemilu yang menghabiskan anggaran begitu besar, dan membuang-buang waktu dan energi dalam menghadapi sebuah kebohongan.

Kedua, boleh jadi kakawatiran terhadap sosok pemimpin yang tidak diinginkan misalnya munculnya pemimpin yang tidak memiliki manajerial yang baik, program kerja yang tidak dapat diterima secara akal sehat mereka untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik, termasuk tentang keberlangsungan kepemimpinan itu sendiri.

Sebaiknya Pilpres harus dilakukan secara jujur dan adil sehingga masyarakat merasa lega dan dapat menerima apa adanya, tidak memaksakan kehendak untuk dapat meraih kemenangan dengan menghalalkan berbagai cara. Hasil Pemilu curang dipastikan akan menimbulkan malapetaka, karena memimpin bukan atas kehendak rakyat, tetapi atas kemauan pribadi dan kelompok tertentu.

Kita bisa saja curiga dengan kondisi masyarakat Indonesia yang jauh dari kesejahteraan adalah akibat perilaku curang dalam permainan politik. Karena kepemimpinan itu tidak mendapat berkah dari Allah.

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (Al A'raf 96). (*)